

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang termasuk dalam nilai-nilai sosial untuk menciptakan paradigma baru pembangunan yang berpusat pada rakyat, partisipatif dan memberdayakan dan pembangunan berkelanjutan. Menurut chamber ia menjelaskannya konsep dan model pembangunan lebih dari sekedar pemberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar saja sosial (kebutuhan dasar) tetapi lebih mencoba mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal (Noor 2011).

Dalam bukunya “*Community Development, Creating Community Alternatives – Vision, Analysis and Practice*” (1997), Jim Ife menjelaskan bahwa pemberdayaan didefinisikan sebagai menyediakan warga negara dengan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka membentuk masa depan mereka sendiri, memutuskan dan berpartisipasi dalam upaya untuk mempengaruhi kehidupan kelompok. Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan berkaitan erat dengan dua konsep utama, yaitu konsep kekuasaan dan konsep kelompok rentan (Ife 1995).

Berkaitan dengan betapa pentingnya peran manusia dalam pembangunan sehingga pemberdayaan sangat dibutuhkan dalam kemajuan bangsa baik dalam tingkat pemerintah maupun swasta, melakukan tugas dalam bidang pemberdayaan rakyat mempunyai misi yaitu, meningkatkan kemandirian masyarakat dan mengembangkan kompetensi dan kemandirian secara bertahap dengan usaha pengembangan pribadi dan mandiri dari lingkungan. Kemandirian konseptual Pemberdayaan masyarakat ialah kemajuan harus dibuat agar orang bisa membangun dan memelihara ketahanan hidup berbasis kekuatan diri secara terus menerus, dalam artian untuk membuat negara kemerdekaan itu perlu ekonomi yang mapan.

DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) merupakan upaya negara dalam menekan jumlah kemiskinan melalui dinas sosial yang berupa bantuan sosial dengan adanya data tersebut masyarakat yang miskin dapat terdata dengan baik. Dengan bekerja keras mengembalikan tingkat kemiskinan pemerintah melalui

Dinas Sosial yang telah mempublikasikan dana bantuan sosial bagi orang teridentifikasi miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Masyarakat (DTKS). Dengan adanya dana bantuan sosial ini pemerintah ingin rakyat Indonesia memiliki dana untuk memulai atau melanjutkan bisnis (Nurhidayat, Supriyanto, and Nurraharjo 2022).

Bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian negara/lembaga adalah belanja berupa transfer uang, barang atau jasa, pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu, agar dapat melindungi masyarakat dari potensi risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang no 254 “anggaran belanja bansos” uu no5, pp. 1- 31,2015). Dana bantuan sosial diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai program diantaranya Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, Program Bantuan Sosial Tunai, Program Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai Desa, Insentif Tenaga Kesehatan, Pemberian insentif usaha termasuk bantuan modal kerja bagi UMKM. Dalam tahapan penyaluran bantuan sosial yang beredar di kalangan masyarakat masih banyak yang belum tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan pada sistem penyaluran bantuan sosial. Disamping kurang tepatnya penerima bansos itu pada proses terdapat masalah tentang kesamaan data keadaan perekonomian penerima bantuan sosial sehingga memerlukan perengkingan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Dalam hal ini penyaluran bantuan sosial pemerintah memerlukan adanya data kemiskinan masyarakat yang diperoleh dari DTKS. Sedangkan data kemiskinan hanya diperoleh dari BPS dan data tersebut masih belum mendapatkan pembaruan secara berkala. Oleh karena itu diperlukan pembaruan DTKS karena masyarakat yang memiliki kondisi kemiskinan belum terdaftar didalam DTKS yang terupdate (Nurhidayat, Supriyanto, and Nurraharjo 2022).

Dari hasil wawancara peneliti dengan ibu Indah Ayu Syafitri, S.Pd selaku Perangkat Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dan operator DTKS Kecamatan Soko. Bahwasannya usulan peserta DTKS didapat dari alur sebagai berikut, dimulai dengan masyarakat desa melakukan usulan ke pemerintah

desa dengan menemui Kasi Kesejahteraan untuk mendaftar menjadi calon peserta DTKS, Kasi Kesejahteraan masyarakat memberikan formulir yang harus diisi oleh pendaftar, Pemerintah Desa melakukan seleksi kelayakan manual, dengan persetujuan kepala desa formulir yang telah diisi lengkap di serahkan ke operator desa untuk kemudian dimasukkan atau diinputkan kedalam sistem DTKS, dan yang terakhir melakukan validasi ulang.

Dan dari hasil penelitian di lingkungan masyarakat terdapat banyak data peserta DTKS yang tidak tepat sasaran, sehingga dari permasalahan tersebut peneliti mengusulkan adanya Sistem Pendukung Keputusan agar dapat mencegah adanya peserta DTKS yang tidak layak dalam tahap usulan calon peserta DTKS.

Adapun manfaat adanya sistem pendukung keputusan ini yaitu meningkatkan efektifitas penerimaan peserta DTKS dikarenakan banyak faktor lapangan yang dapat mempengaruhi penerimaan peserta diantaranya, faktor kekerabatan perangkat desa, tim sukses pemilihan kepala desa, dan data peserta yang diberikan oleh pemerintah pusat namun belum diperbarui sehingga butuh validasi ulang.

Dengan demikian peneliti mengusulkan adanya sistem pendukung keputusan dalam penyeleksian peserta usulan DTKS agar penerima manfaat DTKS bisa lebih tepat sasaran.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan sistem pendukung keputusan seleksi kelayakan usulan peserta DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) menggunakan metode TOPSIS (*Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution*)?

1.3 Batasan masalah

Diperlukan adanya batasan masalah agar fokus dari permasalahan tidak melenceng dari yang telah dirumuskan berikut diantaranya:

1. Sistem ini dibuat untuk seleksi pesertra usulan calon peserta DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dengan objek penelitian di Kecamatan Soko.
2. Sistem ini dibuat menggunakan algoritma TOPSIS (*Technique Of Order Preferences Similiarity To Ideal Solution*).

1.4 Tujuan

Mengembangkan sistem pendukung keputusan menggunakan metode TOPSIS (*Technique Of Order Preferences Similiarity To Ideal Solution*) dalam seleksi peserta usulan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

1.5 Manfaat

1. Mengimplementasikan ilmu selama pembelajaran program studi dan menguji seberapa jauh pengetahuan dan pemahaman terhadap mata kuliah yang telah ditempuh selama menjadi mahasiswa.
2. Diharapkan dengan adanya sistem ini operator tingkat desa atau kelurahan dapat membantu pengambilan keputusan atas kelayakan peserta DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) berdasarkan point yang diperoleh.



UNUGIRI